

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 30, Nomor 3, Oktober - Desember 2017

Halaman 253 - 380

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	253 - 260
MEMPERKENALKAN KEMBALI PENDIDIKAN HARMONI BERBASIS KEARIFAN LOKAL (<i>PIIL PESENGGIRI</i>) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG	
Ahmad Muzakki	261 - 280
NAHDLATUL ULAMA DAN INTERAKSI ANTAR KELOMPOK KEAGAMAAN DI KOTA GORONTALO	
Muhammad Dachlan	281 - 298
MAKNA PUASA SEBAGAI KOMUNIKASI TERAPEUTIK ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KESEHATAN FISIK DAN MENTAL	
Ditha Prasanti	299 - 312
EVALUASI DAMPAK PROGRAM DIKLAT GURU MUDA MADRASAH TERHADAP KINERJA MADRASAH	
Yasri	313 - 326
THE IMPLEMENTATION OF TEACHERS' PROFESSIONAL EDUCATION (PPG) PROGRAM FOR ISLAMIC EDUCATION AT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	
Jejen Musfah	327 - 338

TRANSFORMASI SOSIAL MADRASAH IBTIDAIYAH MENJADI MADRASAH <i>TRENDSETTER</i> DI PEKALONGAN	
Sopiah, Dwi Istiyani, Musfirotun Yusuf, dan Ahmad Baihak -----	339 - 358
HUBUNGAN PRAKTIK TEOLOGI JABARIYAH DENGAN KEMISKINAN PADA NELAYAN DI KUALA LANGSA ACEH	
Ismail Fahmi Arrauf Nasution -----	359 - 372
INDEKS PENULIS -----	373 - 376
PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN -----	377 - 380

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 7 (tujuh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem pengelolaan menjadi OJS ini ternyata menjadi penyebab penerbitan mengalami keterlambatan. Seperti pada nomor pertama dan kedua, perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Januari 2018, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor ketiga ini sebenarnya adalah Oktober-Desember. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Pada edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur

dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta) yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2017. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Januari 2018
Dewan Redaksi

**NAHDLATUL ULAMA DAN INTERAKSI
ANTAR KELOMPOK KEAGAMAAN DI KOTA GORONTALO**

**NAHDLATUL ULAMA AND INTER-RELIGIOUS INTERACTION
IN GORONTALO CITY**

MUHAMMAD DACHLAN

Muhammad Dachlan

Balai Litbang Agama Makassar
Jl. AP. Pettarani No. 72,
Makassar
muh.dachlan1970@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 29 September 2017,
Revisi 4 Januari 2018,
Disetujui 15 Januari 2018.

Abstract

This paper focuses on the case of NU in Gorontalo City with the reason that NU in this city is a majority group and is needed to assist the government in building internal harmony of religious society. This study uses a qualitative method. The results of this study showed that 1) NU structurally has constraints. The organization does not work in accordance with good organizational mechanisms; 2) NU is more understood as a symbol of moderate identity of aswaja group; 3) The relation between NU and Muhammadiyah in the 1960-1990s were tough and tense; 4) The appearance of Salafi and Syiah groups is a new trigger for internal religious conflict. This requires the active role of the NU as an organization that promotes moderatism.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Religious Group, moderate, internal conflict

Abstrak

Tulisan ini fokus pada hasil penelitian tentang NU di Kota Gorontalo, dengan alasan bahwa NU di kota ini merupakan kelompok mayoritas dan dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam membangun harmoni internal umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) NU secara struktural mengalami kendala. Roda organisasi tidak berjalan sesuai dengan mekanisme keorganisasian yang baik; 2) NU lebih dipahami sebagai simbol identitas kelompok Aswaja yang moderat; 3) relasi NU dan Muhammadiyah pada tahun 1960-1990-an berjalan alot dan tegang; 4) Kehadiran kelompok Salafi dan Syiah menjadi pemicu baru konflik internal umat beragama. Hal ini membutuhkan peran aktif dari NU sebagai organisasi yang mengusung moderatisme.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Kelompok Keagamaan, moderat, konflik internal

PENDAHULUAN

Tulisan ini memfokuskan kajian pada dinamika NU di Kota Gorontalo dan interaksinya dengan kelompok keagamaan lain, yang berkembang di Kota Gorontalo. Kehadiran NU sejak tahun 1938 membawa pengaruh yang sangat penting dalam menjaga tradisi keagamaan masyarakat Gorontalo, sekaligus menjadi pilar penting bagi terciptanya hubungan internal kelompok keagamaan di Kota Gorontalo yang dinamis.

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Kehadiran NU meramaikan pentas keorganisasian berbasis agama. Sebelumnya, telah terbentuk SI (Sarekat Islam) pada tahun 1911, yang merupakan transformasi dari SDI (Sarekat Dagang Islam), yang kemudian berubah menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada tahun 1930. SI tampaknya menjadi cikal bakal bagi organisasi modern Islam selanjutnya. Pada tahun 1912, Muhammadiyah lahir di Yogyakarta. Al-Irsyad pada tahun 1914 dideklarasikan di Jakarta, dan Persis (Persatuan Islam) di Bandung pada tahun 1923 (Jamil 2008, 277-278).

Hadirnya ormas-ormas Islam ini menunjukkan transisi gerakan keagamaan di Indonesia secara umum di awal abad 20. Transisi yang dimaksud adalah perubahan gerakan masyarakat Islam di Nusantara, dari kelompok-kelompok sosial, pesantren, menjadi organisasi modern. Di antara organisasi ini, NU yang paling terlihat mengalami proses transisi itu. NU dilahirkan sebagai representasi modern dari gerakan tradisional. Artinya, kelompok tradisional sudah memiliki wadah pergerakan melalui pesantren. Tetapi trend kelompok Islam saat

itu menyebabkan kelompok-kelompok yang dipimpin oleh para Kyai dari Jawa Timur memprakarsai berdirinya NU. Pada titik ini, NU pun terseret dalam arus modernitas gerakan Islam, meski basis pemihakan pada gerakan tradisional Islam.

Cita-cita pendirian NU dapat dilihat dari statuta sebagai berikut:

"Mengadakan perhoebongan di antara para oelama-oelama yang bermadzhab; memeriksa kitab-kitab sebelom dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari kitab-kitab ahli soenah wal djamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah; menjiarkan agama Islam berazaskan pada madzhab empat dengan djalan apa sadja yang baik; berikhtiar memperbanjak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal yang berhoebongan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe joega dengan hal ihwalnya anak-anak jatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan oentoek mamadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam (Jamil 2008, 281)".

Rumusan statuta NU di atas menunjukkan bahwa organisasi NU didirikan untuk membangun konsolidasi antar ulama dalam rangka melakukan pengecekan terhadap kitab-kitab yang berkembang, agar berkesesuaian dengan paradigma Ahlusunnah wal Jamaah (baca: Aswaja). Hal yang menarik, meski NU selama ini dituduh sebagai biang bid'ah karena praktik-praktik keagamaannya, justru statuta NU memisahkan antara "Aswaja" dan *ahlul bid'ah*. Siapa *ahlul bid'ah* yang dimaksud? Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dalam dokumen-dokumen NU. Pun dalam perkembangan selanjutnya, NU lebih akrab dengan tudingan sebagai *ahlul bid'ah*.

NU jelas sekali berada di garis kultural dan sosial. Umat yang ingin dibela oleh NU (selain atribut teologisnya) adalah mereka yang berada pada garis sosial, yang disebut sebagai kaum *mustad'afin*. Dalam statuta di atas disebutkan sebagai anak yatim dan fakir miskin. Basis gerakan untuk mendukung semua itu adalah pertanian dan usaha dagang yang sesuai syariat. Sayang sekali, NU belakangan hanya berfokus pada usaha keagamaan dan kurang memperhatikan aspek pertanian dan perdagangan.

Perjalanan NU mengalami fluktuasi ketika pada tahun 1955 ikut aktif sebagai partai politik. Efek positif dari keikutsertaan di bidang politik adalah semakin meluasnya pengaruh NU di seluruh Indonesia. Di Sulawesi, NU mulai ramai berkembang pada era ini. Namun, seiring dengan melemahnya peran politik NU secara nasional di era orde baru, eksistensi organisasi juga mengalami penurunan (Balitbang Agama Makassar 2010, 72).

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang NU di Gorontalo bisa dikategorikan sangat kurang. Tidak ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang gerakan NU di Gorontalo. Tulisan Isman Jusuf (2011) yang diterbitkan dalam media *online Kompasiana* hanya sedikit menyinggung tentang sejarah awal kehadiran NU di Gorontalo pada tahun 1938, yang dibawa oleh Salim bin Jindan. Kajian terbaru tentang NU di Gorontalo bisa ditemukan dalam laporan penelitian Sapriillah (2017) tentang peta keagamaan di Kota Gorontalo. Dalam laporan tersebut, NU menjadi salah satu subjek penelitian bersama ormas keagamaan lainnya.

Sapriillah menggunakan istilah kelompok keagamaan sebagai upaya untuk menyoal semua kelompok keagamaan yang ada di Kota Gorontalo. Kelompok keagamaan yang dikaji, selain NU adalah Muhammadiyah, Sarekat Islam (SI), Persatuan Islam (Persis), Wahdah Islamiyah (WI), Al-Irsyad, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini dikategorikan sebagai organisasi masyarakat berbasis agama. Dikaji pula kelompok keagamaan Syiah, Ahmadiyah, Salafi Ibnu Qayyim, dan kelompok tarekat.

Salah satu penelitian tentang NU di kawasan Sulawesi Utara adalah penelitian Kawu (2009). Penelitian ini menyimpulkan bahwa NU mulai berkembang di Manado pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap munculnya kebutuhan politik NU dalam skala nasional untuk mendapatkan suara. Kesimpulan serupa dapat ditemukan dalam penelitian Sapriillah tentang NU di Kendari (2008) dan tentang NU di Kalimantan Timur (2010), Sunar (2009) tentang pergerakan NU di Sulawesi Selatan. Penelitian tentang NU di luar pulau Jawa mengindikasikan bahwa pergerakan NU secara massif mulai terjadi setelah tahun 1952 untuk merespons kebutuhan SDM (sumber daya manusia) politik NU secara nasional. Meski demikian, kehadiran NU di luar Jawa sudah terjadi setelah NU berdiri tahun 1926. NU di Sulawesi Selatan sudah ada sejak tahun 1930-an. Tokoh-tokoh NU, seperti A. Mappanyukki, Andi Djemma, Puang Ramma, dan para alim ulama alumni Pulau Salemo yang turut berjuang melawan Belanda adalah pembawa NU di Sulawesi Selatan (Sunar 2009, 33).

Pada masa sekarang, kajian tentang NU secara nasional menarik minat peneliti, baik dari dalam negeri maupun dalam negeri.

Misalnya, sarjana Australia (Fealydan Barton 1997, 266) menulis tentang radikalisme tradisional disematkan pada NU. Kajian kedua peneliti ini menegaskan bahwa NU adalah organisasi keagamaan yang berjuang keras untuk melindungi dan merawat tradisi-tradisi masyarakat Islam di Nusantara yang sudah berlangsung selama berabad-abad.

Kajian (Jamil et.al. 2008, 341) menempatkan NU sebagai bagian dari gerakan Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Kajian ini berupaya untuk "merekonstruksi model tradisi studi keIslaman dari ormas-ormas Islam di Indonesia". Karena itu, Jamil dkk. mengklaim bahwa kajiannya adalah masuk dalam kajian sejarah kontemporer dengan fokus utama mengenai studi keIslaman, khususnya empat ormas keagamaan Islam nasional, yaitu: NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Cukup mengherankan ketika penulis tidak memasukkan Sarekat Islam (SI) dalam kajiannya, mengingat SI sendiri bisa dikategorikan sebagai peletak dasar organisasi Islam kontemporer di Indonesia.

Baso (2006, 60) yang dikenal sebagai penulis NU yang produktif, menulis sebuah buku dengan judul yang menggelitik, Agama NU untuk NKRI. Kajian ini secara khusus mempromosikan model keagamaan NU sebagai basis tradisional, kultural, dan sekaligus historis untuk dijadikan sebagai bagian dari gerakan kebangsaan untuk merawat keindonesiaan dari serangan kelompok neo-puritanis, yang mulai gencar memasuki alam pemikiran dan gerakan keagamaan di Indonesia, khususnya setelah era media sosial menjadi basis komunikasi massa masyarakat Islam Indonesia.

Dua kajian di atas merupakan sebagian kecil dari kajian tentang NU di Indonesia. Berbagai kajian di atas menunjukkan betapa NU menjadi bahan kajian yang menarik perhatian para peneliti. Kajian yang penulis lakukan merupakan salah satu kajian dengan NU Gorontalo sebagai lokus. Meski lokusnya sangat lokal, tetapi kajian ini bisa dipahami dalam dua cara pandang: *Pertama*, kehadiran NU di tahun 1938 melengkapi kehadiran SI tahun 1928 dan Muhammadiyah tahun 1929. Bisa dibayangkan bahwa Islam di Gorontalo pada era awal kemerdekaan sudah cukup aktif dan bergeliat. Ini bisa dimaklumi mengingat pergerakan keagamaan di Gorontalo memang sangat aktif sejak era kesultanan. *Kedua*, tulisan ini bisa dikatakan sebagai tulisan pertama tentang NU secara spesifik di Kota Gorontalo.

Kerangka Konsep

NU dan organisasi kemasyarakatan lainnya adalah bentuk nyata dari kelompok yang disebut sebagai *civil society* (Abdalla 2004, 56); (Laode Ida 2002, 213). Kajian tentang *civil society* sejauh ini diarahkan kepada relasi antara negara dan masyarakat, bukan pada relasi antar negara (Effendi 1998, 172; Hikam 1996, 43). Ini dipengaruhi teori Gramsci yang membedah dua model tubuh, yaitu tubuh politik dan tubuh sosial (Said 2010, 77). Tubuh sosial adalah representasi dari masyarakat sipil yang tidak mungkin bersatu dengan tubuh politik yang direpresentasikan oleh negara.

Indonesia adalah negara yang demokratis akomodatif. Posisi negara tidak benar-benar vis a vis dengan rakyat. Ormas seperti NU memainkan peran ganda, sebagai perwakilan masyarakat sipil di satu sisi dan

sekaligus sebagai perwakilan negara di sisi lain (Fealy dan Barton 1997, 217). Berbeda dengan posisi MUI dan ICMI (di era Orde Baru) yang secara total digunakan sebagai “penyambung lidah” negara.

NU bisa menjadi representasi negara sekaligus menjadi representasi sosial (Binhad (ed.) 2010, 74). Sebagai contoh, ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017, NU seolah menjadi juru bicara negara dan alat legitimasi untuk menjelaskan ke publik posisi politik dari dikeluarkannya Perppu tersebut. Di sisi lain, ketika pemerintah merencanakan PP tentang FDS (*Full Day School*), NU berada di garda terdepan untuk menolak sebagai representasi kepentingan madrasah diniyah yang terancam eksistensinya.

NU dihuni oleh para ulama yang berpikiran rasional. Cara berpikir NU yang *tawazun*, *tawasut*, dan *tasamuh* adalah modal yang sangat baik untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, dalam kasus relasi internal antar umat beragama di Gorontalo, Kyai-Kyai NU biasanya berada di posisi terdepan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk peran NU dalam membendung arus radikalisme yang mengancam integrasi bangsa sangat besar dalam Republik ini (Baso 2006, 103).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai alat utama dalam mencari data. Data kemudian dianalisis dengan pendekatan kritik. Pendekatan kritik yang dimaksud adalah menempatkan hasil wawancara dengan narasumber dalam situasi sosial yang lebih kontekstual

dan historis. Wawancara dilakukan kepada para informan; pengurus inti NU, aktivis NU, Ketua MUI, tokoh agama, pengurus Muhammadiyah, dan kelompok Salafi. Dua kategori informan terakhir digunakan untuk mengabsahkan data yang ditemukan yang berkaitan dengan mereka, seperti kasus friksi antar NU-Muhammadiyah pada tahun 1960-1990-an di Kota Gorontalo.

Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NU dan kelompok Salafi. Observasi yang berhasil dilakukan adalah ketika kelompok anak Muda NU melakukan diskusi tentang pemikiran-pemikiran kritis di Gorontalo. Sedangkan observasi pada pengajian Salafi dimaksudkan untuk melihat langsung jumlah jamaah dan tema-tema kajian yang mereka lakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Historis Ormas Keagamaan di Gorontalo

Gorontalo merupakan salah satu wilayah di pulau Sulawesi, yang memiliki sejarah pergerakan organisasi keagamaan Islam yang panjang dan dinamis, sejak pra kemerdekaan hingga terbentuknya Provinsi Gorontalo. Ormas nasional, baik yang bercorak nasionalis maupun agama (Islam), sudah ada sejak awal abad 20, sebagai bagian dari gerakan perjuangan rakyat Gorontalo melawan penjajah Belanda yang menguasai Kerajaan Gorontalo.

Organisasi Sinar Budi boleh dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan yang paling pertama tumbuh dan berkembang di Gorontalo. Sinar Budi berdiri tahun 1912

oleh pemuda Gorontalo di antaranya: Husian Katili, Saleh Mina, dan Patihedu Monoarfa (Depdikbud 1997, 73; Jusuf 2011, 106; Amin dan Hasanuddin 2012, 86; Saprillah 2017, 88). Organisasi sosial ini didirikan sebagai apresiasi terhadap munculnya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tahun 1908. Bisa dikatakan, Sinar Budi sebagai "jaringan intelektual" dari Budi Utomo. Disebut demikian, karena organisasi Sinar Budi adalah organisasi lokal di Gorontalo, tetapi mendapat inspirasi dari gerakan Budi Utomo. Tujuannya pun relatif sama, yaitu membangun kesadaran kebangsaan, salah satunya melalui bahasa Melayu (Depdikbud 1978, 100).

Kecemerlangan gerakan Sarekat Islam di pulau Jawa berpengaruh pula di Gorontalo. H.O.S. Cokroaminoto melakukan lawatan kerja ke Gorontalo pada tahun 1923 dan peristiwa ini menjadi titik awal kehadiran SI di Gorontalo. Tahun 1928 (lima tahun setelah kunjungan H.O.S. Cokroaminoto, SI secara resmi berdiri di Gorontalo (Kimura 2013). SI bisa dikatakan sebagai ormas keagamaan Islam pertama yang berkembang di Gorontalo. Seperti juga di pulau Jawa, fokus gerakan SI di Gorontalo adalah untuk membangun semangat perjuangan masyarakat Gorontalo yang 100% beragama Islam (Depdikbud 1997, 215) melawan Belanda.

Di belakang SI, muncul ormas Muhammadiyah pada tahun 1929. Muhammadiyah diperkenalkan oleh seorang aktivis asal Gorontalo yang menempuh pendidikan di sekolah guru Kweekschool Gunung Sari, Yogyakarta. Tanggal 8 September 1929, pengurus organisasi Muhammadiyah Cabang Gorontalo dilantik oleh Mohammad Yunus selaku Sekretaris

Muhammadiyah dari Yogyakarta. Pengurus pertama Muhammadiyah Cabang Gorontalo itu dipimpin oleh Tom Olil (Polantalo 1989, 69). Seperti gerakan Muhammadiyah secara nasional, Muhammadiyah di Gorontalo pun aktif mendirikan sekolah, baik dalam konteks organisasi maupun individu Muhammadiyah, seperti Nani Wartabone yang juga mendirikan sekolah Muhammadiyah (Jusuf 2011, 271; Saprillah 2017, 66).

Organisasi kemasyarakatan nasional lainnya yang sudah ada di Gorontalo sebelum kemerdekaan adalah Persis. Tahun 1940-an, Persis sudah ada dan menjadi cabang ke-42 di seluruh kawasan Nusantara. Sayangnya, jejak Persis sempat hilang karena pada tahun 1968, Persis Gorontalo secara resmi ditutup karena dianggap tidak aktif dan dikhawatirkan akan disusupi oleh PKI yang sudah dibubarkan pada tahun 1965. Namun pada tahun 1996, Persis didirikan kembali oleh mantan aktivis mahasiswa Persis di Gorontalo (Saprillah 2017, 43).

Setelah era kemerdekaan, dinamika pergerakan ormas Islam di Gorontalo bergeser ke bidang politik. Hingga penyederhanaan partai oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) mendominasi pemilihan suara dan kursi di DPRD Kabupaten dan Kota Gorontalo, kecuali pada pemilu tahun 1955 yang dimenangkan oleh Partai Masyumi di Gorontalo. Termasuk NU yang juga memainkan peran penting dalam kancah politik lokal dan nasional di Gorontalo (Madjowa 2015, 104).

Pergerakan ormas Islam mengalami penurunan pada era tahun 1973 hingga pasca reformasi. Penyatuan partai Islam ke

PPP berpengaruh pada hilangnya gairah ormas Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dalam situasi itu, muncullah organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Al-Khaerat (1978), Al-Irsyad (1982), Jamaah Tabligh (1993), LDII (1995), dan Hidayatullah (1996). Bahkan orang Ahmadiyah dari Kotamobagu juga sudah ada di Gorontalo pada tahun 1980-an (Sapriillah 2017, 56).

Era selanjutnya adalah era reformasi, keistimewaan situasi reformasi bagi warga Gorontalo adalah berdirinya Provinsi Gorontalo pada tahun 2000. Sebagai ibu kota provinsi, Gorontalo tentu menjadi sasaran bagi orang luar daerah untuk mengembangkan diri di Gorontalo, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Dalam konteks keagamaan pasca reformasi, kelompok Salafi, seperti Wahdah Islamiyah mulai berkembang. Sementara itu, pada tahun 2013, Ahmadiyah membentuk cabang di Kota Gorontalo. ABI (Ahlul Bait Indonesia) juga masuk ke Gorontalo pada tahun 2015. Beberapa kelompok tarekat nasional, seperti Muhyinnufus, Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dan beberapa kelompok tarekat lokal lainnya pun berkembang.

Pandangan Keagamaan NU

Gagasan dasar keagamaan NU secara umum adalah Ahlussunnah wal Jamaah. NU mengklaim diri sebagai pelanjut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ciri khas tertentu. Dalam bidang fiqih, NU meletakkan dasar pemikiran kepada empat imam mazhab, yaitu Syafi'iyah (Imam Syafi'i), Malikiyah (Imam Malik), Hanafiyah (Imam Hanafi), dan Hanbaliyah (Imam Ahmad bin Hanbal). Di bidang teologi,

NU menyandarkan diri pada pemikiran teologi Imam Asy'ari, sehingga NU bisa dikategorikan sebagai pelanjut Asy'ariyah. Di bidang tasawuf, NU berorientasi pada tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi (Jamil 2008, 361).

Berdasarkan basis pemikiran para ulama di atas, NU memiliki paradigma keagamaan yang lentur. Ada empat kerangka pemikiran NU yang penting, yaitu *tawāzun*, *tawassuṭ*, *tasāmuḥ*, dan *i'tidāl* (Siradj 1996, 312). Dengan empat cara pandang ini, NU dikenal sebagai organisasi yang adaptif terhadap realitas sosial, moderat dalam relasi antar umat beragama, dan menerima tradisi lokal, serta menerima model kebangsaan NKRI.

Carapandang NU inilah yang menjadi titik penting dalam relasinya dengan kelompok lain di Gorontalo. Penerimaan NU secara terbuka terhadap tradisi lokal yang dalam perspektif Muhammadiyah adalah bid'ah menjadi titik singgung yang panjang dalam hubungan antara NU-Muhammadiyah, baik dalam skala nasional maupun lokal, seperti yang terjadi di Gorontalo dan sekitarnya pada tahun 1960-1990-an. Muhammadiyah merupakan organisasi modernis yang mengusung kampanye puritanisme atau pembersihan akidah dari segala bentuk takhayul, bid'ah, dan khurafat (Jamil 2008, 89). Pola yang sama terjadi ketika kelompok Salafi yang datang belakangan, juga mengkampanyekan pemurnian akidah Islam dari segala bentuk kelokalan yang dianggap merusak akidah Islam (Jamhari dan Jahroni 2004, 117).

Agenda kaum Salafi adalah penegakan nalar keIslaman yang sesuai dengan praktik kenabian, sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in, yang disebut sebagai Salafus Saleh

(orang-orang terdahulu yang saleh).Praktik keagamaan yang tidak ditemukan dalam tradisi salaf adalah bid'ah, yang harus di jauhi. Berbanding terbalik dengan NU, yang justru memelihara tradisi Islam yang berkembang pasca generasi salaf. Misalnya, tradisi *maulidan*. Tradisi ini berkembang di era Daulah Fatimiyah atau tiga abad setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Bagi kaum Salafi, tradisi maulid wajib di jauhi dan dikategorikan bid'ah, karena tidak ditemukan praktiknya pada masa Salafus Saleh. Bagi NU, tradisi maulid adalah wadah kultural yang menarik untuk digunakan sebagai syiar Islam bukan sebagai bagian yang inheren dengan syariat Islam. Maulid berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. dan bagian dari bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, upacara maulid tidak masalah untuk dilakukan sebagai bagian dari syiar Islam.

Perbedaan cara pandang inilah yang menjadi medan interaksi antara NU dan kelompok keagamaan lainnya. Di Gorontalo, menguatnya kelompok Salafi menjadi refleksi yang penting bagi NU untuk merumuskan kembali strategi dakwah mereka, mengingat kelompok Salafi memiliki pergerakan yang cukup kuat, dinamis, dan terorganisir dengan baik.

Cara pandang kebangsaan NU yang direpresentasikan melalui jargon "NKRI harga mati" pun berpotensi memunculkan perbedaan paradigma dengan kelompok keagamaan yang berorientasi politik, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (disingkat: HTI). Pandangan politik keagamaan HTI yang universalis menjadi lawan NU yang partikularis. HTI yang mengkampanyekan negara Islam, sedangkan NU menginginkan NKRI. Bagi NU, negara Indonesia sudah

cukup sebagai payung bagi umat Islam di Indonesia (Elyasa 1994). Dalam konteks keindonesiaan, kehadiran NU sebagai patriot kebangsaan menjadi penting dalam membentengi kehadiran kelompok transnasional. Isu Islam Nusantara yang muncul di Mukhtar NU di Jombang tahun 2015 menjadi penegasan bahwa NU menjadi pengawal penting wacana kebangsaan di Indonesia. Islam Nusantara setidaknya memuat gagasan tentang pribumisasi Islam dan wacana kebangsaan. Bahkan lebih jauh bisa menjadi gerakan politik, ekonomi, dan sosial (Baso 2015, 16).

Potret Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Gorontalo

Di Gorontalo, NU bisa dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: NU Struktural, NU Kultural, dan NU sebagai personal yang melampaui organisasi. Kelompok NU Struktural adalah mereka yang berada di tubuh organisasi dan menjalankan roda organisasi berdasarkan struktur dan program kerja organisasi. Warga NU yang terlibat dalam struktur NU disebut sebagai pengurus NU. Di Provinsi Gorontalo, struktur NU sudah terbentuk di enam kabupaten/kota. Namun, untuk tingkat MWC (Majelis Wakil Cabang) belum ada yang terbentuk. Struktur organisasi NU dikenal pula sebagai jam'iyah NU (Elyasa 1994, 234).

Kelompok NU Kultural adalah kelompok nahdliyyin yang bergerak di luar struktur. Mereka biasanya merupakan kelompok-kelompok muda yang melakukan gerakan-gerakan intelektual atau gerakan sosial. Di Gorontalo, kelompok kultural direpresentasikan oleh kaum nahdliyyin yang tergabung dalam komunitas

Gusdurian Gorontalo. Sedangkan kelompok NU personal adalah mereka yang berada di luar struktur, tetapi juga tidak terlibat dalam gerakan kultural. Mereka mewarisi NU secara personal dan menjadikan cara pandang keagamaan NU sebagai cara pandang dan praktik keagamaannya.

NU hadir di Gorontalo sepuluh tahun setelah kehadiran SI dan Muhammadiyah. NU diduga mulai ada tahun 1938, dibawa oleh seorang aktivis Islam berketurunan Arab bernama Salim bin Jindan (Jusuf 2011, 57). Tidak seperti SI dan Muhammadiyah, kehadiran NU masih diperdebatkan apakah tahun 1938 itu sebagai kehadiran organisasi atau orang NU yang mengembangkan pengajian di Gorontalo. Ini karena informasi tentang Salim bin Jindan yang dianggap sebagai tokoh pembawa NU sangat sedikit. Bahkan, Salim bin Jindan lebih banyak dikaitkan dengan Partai Nahdlatul Syafiyah yang berdiri di Sangir pada tahun 1934 dan berkembang ke Gorontalo. Partai Nahdlatul Syafiyah mengalami kemandekan karena hadirnya PAI (Partai Arab Indonesia), kelompok keagamaan berbasis orang Arab yang berskala nasional. Sedangkan Partai Nahdlatul Syafiah adalah kelompok lokal yang hanya bergerak di kawasan Sulawesi bagian Utara dan Tengah. Di Sulawesi Selatan, kelompok ini tidak banyak dikenal.

Secara nasional, NU berkembang di luar pulau Jawa pada pertengahan tahun 1950-an. Ini berkaitan dengan kepentingan politik NU yang saat itu memiliki gerbong partai politik PNU (Partai Nahdlatul Ulama). Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara, NU mulai berkembang pada tahun 1950-1960 dan mengalami penurunan pada tahun 1980-an hingga munculnya Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) sebagai gerbong politik NU (Balai Litbang Agama Makassar 2010). NU Gorontalo pun berada pada pola yang sama. NU secara keorganisasian mulai berkembang untuk menunjang kepentingan politik PNU.

Hasil kerja politik NU di Gorontalo boleh dikatakan signifikan, karena suara yang diperoleh juga cukup signifikan. Perhatikan suara perolehan NU atau kursi yang diduduki PNU pada era 1955-1971 berikut ini.

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilu Tahun 1955-1971 di Gorontalo

Pemilu/Periode	Suara/Kursi	Suara/Kursi Terbanyak
1955	11,27%	Masyumi 37,35%
1961-1966	4 kursi DPRD GR	PSII
1966-1967	4 kursi DPRD	PSII
1967-1969	8 Kursi DPRD	PSII
1969-1971	4 Kursi DPRD	Perwakilan Organisasi Profesi
1971-1976	4 Kursi DPRD	Golongan Karya

Diolah dari Madjowa, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa suara PNU di Kabupaten Gorontalo relatif signifikan mulai dari pemilu raya 1955 hingga 1971. Bahkan pada periode DPRD Kabupaten Gorontalo 1967-1969, PNU mendapatkan 8 kursi dan menempatkan H. Mile (kader PNU) sebagai Ketua DPRD (Madjowa 2015, 84). Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan politik NU pada era Orde Lama hingga awal Orde Baru berlangsung aktif dan dinamis. Pada tahun 1971, ketika Kota (administratif) Gorontalo terbentuk, Walikota pertama Edy Bakari adalah seorang kader NU militan.

Kebijakan pemerintah Soeharto yang menyederhanakan partai dan menggabungkan partai-partai Islam ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpengaruh pada menurunnya dinamika organisasi NU. Jalur politik tidak lagi mewakili NU secara organisasi. Para politisi NU yang ingin

berkarir politik, ada yang menggunakan jalur PPP, ada pula yang menggunakan jalur Golongan Karya. Bahkan ketika pemilu 1999, PKB tidak bisa menjadi representasi tunggal orang NU di Kota Gorontalo.

NU secara organisasi mengalami kelesuan. Walaupun setiap 5 tahun ada suksesi kepengurusan, tetapi program organisasi tidak berjalan sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Ketika pemekaran Provinsi Gorontalo terjadi, NU secara organisasi memang melakukan penyesuaian dengan membentuk Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang di enam kabupaten/kota. Namun, dinamisasi kepengurusan ini tidak berimplikasi pada akselerasi organisasi. Dibandingkan dengan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan bahkan pendatang baru Wahdah Islamiyah, organisasi NU tampak tertinggal. PWNU Provinsi Gorontalo bahkan sampai hari ini tidak memiliki sekretariat permanen. Rencana pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama yang sudah diresmikan oleh KH. Said Aqil Siradj pada tahun 2016 hingga saat ini belum bisa diwujudkan.

Dalam hal pendidikan formal, peran organisasi NU pun bisa dikatakan lemah. NU di Kota Gorontalo tidak memiliki lembaga pendidikan, kecuali Raudatul Atfal. Padahal organisasi lain, seperti Muhammadiyah yang memang *concern* di bidang pendidikan memiliki puluhan lembaga pendidikan. Persis yang baru berkembang tahun 1996 memiliki dua lembaga pendidikan setingkat MI dan MTs. Al-Irsyad memiliki sekolah unggulan, TK dan SD Sains yang merupakan salah satu sekolah favorit di Gorontalo. Hidayatullah memiliki satu sekolah dengan tiga tingkatan, TK-SD-MTs. Bahkan Wahdah Islamiyah yang baru berkembang belakangan bisa

mendirikan pesantren yang berkedudukan di Bonebolango. Lembaga pendidikan yang dianggap sebagai pesantren NU adalah pesantren yang didirikan oleh KH. Ghofir di Kabupaten Pohuwato (Nuruddin 2017, 108).

NU sebagai Identitas Keagamaan Melampaui Organisasi

Secara organisasi, NU memang dianggap memiliki kelemahan, namun eksistensi NU di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sangat kuat. Kekuatan NU bukan pada struktur organisasinya, tetapi jamaahnya. NU di Gorontalo tidak bisa didekati dengan pendekatan formal organisasi, tetapi dengan pendekatan kultural. Orang NU relatif banyak di Kota Gorontalo, bahkan dianggap sebagai kelompok mayoritas di Gorontalo. NU di Kota Gorontalo adalah campuran dari kyai karismatik, pejabat, jamaah tarekat, dan organisasi Al-Khaerat. Para kyai (tokoh agama) yang menjadi salah satu unsur penting dalam struktur keagamaan di Gorontalo adalah representasi orang NU. KH. Abbas Rauf, KH. Adam Zakaria hingga KH. Abd. Rasyid Kamaru adalah ulama karismatik di Gorontalo yang juga merupakan tokoh-tokoh NU. KH. Sarmada Inaku, KH. Abd. Muid (Ketua MUI Kota Gorontalo) yang merupakan tokoh Al-Khaerat. juga dikenal sebagai tokoh NU (meski berbeda organisasi, namun tokoh-tokoh Al-Khaerat di Gorontalo dikenal juga sebagai tokoh NU). Kesamaan perspektif keagamaan tampaknya menjadi faktor yang menyebabkan kedekatan NU dan Al-Khaerat).

Sebagai komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, NU adalah yang terbesar dan yang terkuat di Gorontalo. Warisan agama bersendi kebudayaan yang disusun oleh

para pembawa Islam dan para sultan, seperti Sultan Amai, Sultan Butotihe, dan Sultan Eyato adalah milik NU. NU muncul sebagai kekuatan atau sebagai katup pengaman bagi warga Gorontalo yang telah terbiasa dengan tata cara keIslaman yang sudah dipraktikkan turun temurun, seperti dikili (acara zikir bersama), miraji (isra' mi'raj), pemasangan lampu pada hari ke 27, memasang gambar ulama di rumah, dan praktik keIslaman yang khas lainnya.

NU telah menjadi semacam pelindung dan tameng bagi masyarakat Gorontalo, dan bahkan telah menjadi identitas. Apabila kita menemukan masjid yang bernuansa tradisional, ada beduk, dan mimbar khatib memiliki tangga, orang Gorontalo dengan mudah menyebutnya sebagai masjid NU. Padahal, para takmir dan jamaah masjid tidak pernah dikader sebagai warga NU. Masjid-masjid ini dengan mudah disebut sebagai masjid NU, sebagai pembeda dari masjid Muhammadiyah, Al-Irsyad, Hidayatullah, dan Wahdah Islamiyah yang memiliki suasana masjid yang berbeda dengan masjid warga Gorontalo secara umum. Apa yang dapat dipahami dari kenyataan ini bahwa NU menjadi simbol kelompok kultural. Kehadiran NU secara nasional menjadi garansi untuk membangun pembeda dan sekaligus pertahanan atas praktik keberagaman masyarakat Gorontalo.

Relasi NU dan Muhammadiyah; Konflik dan Integrasi

Tahun 1960 hingga 1990-an merupakan era buruk bagi relasi NU-Muhammadiyah di Kota Gorontalo. Berbagai friksi terjadi, baik dalam level kelompok maupun personal. Friksi kelompok NU dan Muhammadiyah

tidak hanya terjadi dalam ruang perdebatan, tetapi juga melibatkan fisik dengan frekuensi yang cukup sering, seperti: saling melempar batu, intimidasi fisik, hingga terbunuhnya seorang warga (Abdurrahman B, 5 Agustus 2017). Friksi ini pun terasa dalam lingkungan keluarga yang berbeda afiliasi, seperti pengalaman dalam keluarga FK. Dua kakeknya yang berbeda kelompok (NU dan Muhammadiyah) menjadikan dirinya sebagai arena konflik kepentingan (Fadil K, 7 Agustus 2017). Demikian juga pengalaman keluarga AM, pihak keluarga ibu menolak lamaran ayahnya karena persoalan afiliasi identitas tersebut. Namun lamaran akhirnya bisa diterima karena adanya kedekatan keluarga besar (Ahmad M, 6 Agustus 2017).

Masjid Baiturrahim menjadi pusat interaksi warga Muhammadiyah dan warga NU di Kota Gorontalo pada era 1970-an. Kedatangan para intelektual muda Muhammadiyah Gorontalo dari pulau Jawa membawa semangat baru dalam berdakwah. Mereka membuat kajian-kajian dengan pendekatan modernis khas Muhammadiyah. Beberapa tradisi keagamaan yang dijalankan oleh tokoh-tokoh NU, seperti tahlilan, tarawih 20 rakaat, maulidan, dan tradisi lainnya menjadi sasaran kajian. Penggemar dakwah Muhammadiyah semakin banyak.

Hal ini menyebabkan kegelisahan para tokoh NU. Kehadiran tokoh Muhammadiyah di Masjid Baiturrahim yang progresif bisa berimplikasi pada pengaruh tokoh-tokoh NU yang selama ini menjadi imam masjid. "Proyek pembid'ahan" yang dilakukan oleh Muhammadiyah juga dirasakan bisa membawa dampak negatif pada masyarakat Islam Gorontalo yang secara umum sangat tradisional.

Akhirnya, kedua kubu menyepakati untuk melakukan debat ilmiah. KH. Abbas Rauf sebagai tokoh NU dan Kali Gorontalo melawan Yusuf Polapa, intelektual Muhammadiyah. Debat berlangsung seru. Kedua tokoh ini memiliki kemampuan argumentasi yang kuat. Segala dalil yang dimiliki dikeluarkan untuk saling mendukung argumentasi. Debat ini berlangsung tiga hari. Pada hari ketiga terjadi *chaos*, karena para pendukung dari kalangan generasi muda tidak bisa menahan diri. Debat dihentikan. Pihak Muhammadiyah memilih untuk mengalah dan "keluar" dari Masjid Baiturrahim. Mereka berinisiatif membangun masjid sendiri, yang sekarang dikenal sebagai Masjid Darul Arqam.

Tahun 1990-an, friksi NU dengan Muhammadiyah sudah jarang terjadi. Inisiasi untuk melakukan kegiatan bersama antara NU dan Muhammadiyah di pertengahan tahun 1990-an menjadi titik balik relasi NU dan Muhammadiyah di Gorontalo. KH. Adam Zakaria dan Yusuf Polapa tampil bersama membawakan ceramah agama pada acara halal bi halal. Peristiwa ini menandai berakhirnya friksi antara NU sebagai simbol dari masyarakat tradisional dan Muhammadiyah sebagai simbol masyarakat Islam modern. Perdebatan *khilafiyah* tidak pernah lagi terdengar. Masyarakat Islam tradisional sudah memahami arah pandangan keagamaan Muhammadiyah dan masyarakat Muhammadiyah juga sudah mengerti cara pandang keagamaan NU dan masyarakat tradisional. Saat ini, tidaklah mengherankan apabila ada warga Muhammadiyah yang ikut dalam acara-acara tradisional keagamaan. Orang Muhammadiyah Gorontalo tampaknya menerapkan strategi adaptasi yang tepat.

Mereka berhasil menemukan posisi sosial di tengah masyarakat Gorontalo yang kental dengan nuansa adat. Bahkan beberapa tokoh Muhammadiyah adalah juga menjadi penggiat kebudayaan Gorontalo, seperti Ibrahim Polantalo. Di tingkat adat, orang Muhammadiyah pun berperan secara aktif tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Sebagai contoh seorang tokoh adat di Kampung Bugis. Dia adalah salah seorang pemangku adat dan pada subuh hari beliau akan salat subuh di masjid yang tidak qunut.

Hal yang sama pun terjadi di kubu NU. Mereka sudah tidak mempedulikan lagi stigma bid'ah yang dilontarkan oleh orang terhadap praktik keberagaman mereka. Mereka meyakini bahwa apa yang dijalankan memiliki standar-standar yang sudah ditetapkan oleh para kyai-kyai sebelumnya (Rasyid K, 9 Agustus 2017).

Dengan pola saling memahami dan saling membangun teritori seperti ini, hubungan NU dan Muhammadiyah menjadi lebih terbuka dan mencair. Tidak ada lagi perdebatan panjang yang berujung friksi atau konflik yang bisa merusak hubungan antar dua kelompok keagamaan. Kedua kelompok sudah saling menghargai batasan-batasan teologis dan saling memahami. Misalnya, perbedaan 1 Ramadhan. Tidak pernah ada lagi keributan yang terjadi seperti pada masa lalu. Muhammadiyah tetap dengan keyakinannya dan NU pun begitu (Rasyid K, tanggal, bulan, tahun).

NU dan Tantangan Kontemporer

Transisi kehidupan sosial pasca pemekaran membawa dampak bagi kehidupan keagamaan di Kota Gorontalo. Sebagai ibu

kota provinsi, Gorontalo mulai didatangi kelompok keagamaan yang berbeda-beda pandangan. Hal tersebut tidak bisa ditolak karena semua orang memiliki hak hidup, baik sebagai manusia ekonomi maupun sebagai manusia beragama. Dalam pandangan peneliti, Kota Gorontalo akan berkembang sebagai kota metropolitan dengan berbagai tantangan, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun ekonomi.

Sebagai organisasi yang mengusung ideologi Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyyah, NU di Gorontalo dihadapkan dengan munculnya kelompok keagamaan yang juga mengaku sebagai pengusung Ahlussunnah wal Jamaah tetapi dengan pendekatan lain. Mereka biasa disebut sebagai kelompok Salafi. Di Gorontalo, kelompok Salafi terutama direpresentasikan oleh Wahdah Islamiyah dan Salafi Ibnu Qayyim (yang kedua disematkan pada nama masjid tempat mereka melakukan kajian-kajian keagamaan).

Kelompok Salafi memiliki gairah dakwah yang sangat tinggi. Berkat usaha mereka yang gigih, tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan simpati publik Gorontalo. Wahdah Islamiyah misalnya, mulai masuk di awal tahun 2000 dibawa oleh aktivis Wahdah Islamiyah dari Makassar. Tidak lebih dari dua dekade, mereka sudah berhasil membangun masjid, membangun pesantren, dan melaksanakan pengajian rutin. Bahkan tokoh Wahdah Islamiyah sudah masuk dalam jajaran kepengurusan inti lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo.

Kehadiran kelompok Salafi ini memiliki potensi beririsan dengan masyarakat Gorontalo secara umum. Setidaknya sudah

terjadi dua kasus yang melibatkan warga masyarakat dan da'i dari kelompok Salafi. Kasusnya adalah persoalan *khilafiyah* yang sebenarnya sudah pernah terjadi antara NU dan Muhammadiyah sebagaimana disebut di atas. Kasus di Tulumolo dan Kota Baru terjadi karena para da'i Salafi menyinggung perasaan teologis masyarakat Gorontalo.

NU memiliki tantangan untuk kembali menguatkan nalar masyarakat Islam di Kota Gorontalo. Serangan pembid'ahan terhadap tradisi keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Salafi tidak akan berhenti karena agenda utama mereka adalah pembersihan akidah versi mereka. Warga Kota Gorontalo harus diyakinkan bahwa praktik keagamaan yang sudah dilakukan sejak era Sultan Amai (abad XV), Sultan Butotihe (abad XVII), dan Sultan Eyato (abad XVIII) adalah juga memiliki landasan dalam teks primer Islam.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh NU adalah melakukan pengajian keagamaan rutin. Ini penting dilakukan karena NU tidak memiliki pesantren (kecuali Pesantren Kyai Gofir di Pohuwato). Ketiadaan pesantren menyebabkan NU praktis mengandalkan masjid sebagai tempat penyemaian dan pelanggengan nalar Aswaja. Sayangnya, NU tidak memiliki kajian rutin. Hal yang punya malah kelompok Salafi. Wahdah Islamiyah saat ini memiliki tiga titik pengajian yang dihadiri ratusan orang yang sebagian besar dari kalangan generasi muda. Tiga titik yang dimaksud adalah Masjid Al-Markas (milik Wahdah Islamiyah), Masjid Al-Irsyad (milik organisasi Al-Irsyad), dan Masjid Kampus Universitas Negeri Gorontalo (yang sudah berubah menjadi Universitas Negeri BJ. Habibie). Kehadiran ratusan orang dalam setiap kajian menunjukkan bahwa mereka memiliki generasi muda yang akan menjadi

bagian penting dalam pergerakan kelompok Salafi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan.

Sementara NU sebagai organisasi tidak memiliki proses pengkaderan yang mumpuni. Harapan NU satu-satunya untuk mendapatkan kader adalah PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan GP. Ansor. Dua organisasi *underbow* NU ini menjadi instrumen penting dalam merekrut kader. Namun itu kurang memadai. NU perlu membuat dan menggairahkan wacana keIslaman Aswaja versi Nahdliyyin melalui sistem pengajian rutin. Kyai Rasyid Kamaru sebagai kali Masjid Baiturrahim adalah tokoh NU yang menjadi pilar penting di Gorontalo, bersama beberapa kyai lainnya, seperti Kyai Sarmada, Kyai Abdul Muid. Ilmu yang mereka miliki cukup untuk bisa meredam agresifitas kelompok Salafi yang terbilang masih muda.

Tantangan lain adalah kehadiran Syiah. Menurut pandangan beberapa kelompok NU, Syiah bisa mengancam cara pandang mereka dan juga bisa menjadi sumber konflik baru di Gorontalo. Setidaknya kasus yang terjadi di salah satu kelurahan di Gorontalo menjadi contohnya. Beberapa orang warga melaporkan ke pihak kelurahan tentang pergerakan komunitas Syiah yang dianggap meresahkan warga. Pihak Syiah dianggap sudah mulai *show up* dengan melakukan kegiatan dan mengajak warga untuk ikut serta. Ada tiga hal yang menjadi alasannya: 1) Orang Syiah dianggap melebihkan Ali dibanding Rasulullah SAW.; 2) Tidak membaca takbiratul ihram ketika salat; 3) Tidak membaca syahadat ketika duduk tasyahud akhir. Berdasarkan laporan warga ini, pihak yang dilaporkan diminta untuk menjelaskan posisi teologisnya

yang difasilitasi oleh pihak pemerintah setempat. Setelah berdebat beberapa lama, pihak kelurahan meminta agar kedua pihak membuat surat pernyataan. Butir surat pernyataan yang ditandatangani oleh dua pihak yang bertikai, pihak keamanan (Babinsa dan Babinkamtibmas) dan kepala kelurahan, yaitu:

1. Dari kedua belah pihak telah menyelesaikan secara kekeluargaan.
2. Kami selaku pihak pertama (pihak warga yang melapor) tidak menginginkan ada lagi kajian-kajian yang mengajak masyarakat Donggala.
3. Kami selaku pihak kedua tidak akan lagi melakukan kajian-kajian di masjid maupun di rumah-rumah.
4. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan, apabila kedua belah pihak melanggar akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Ada dua hal yang memengaruhi persoalan Syiah muncul menjadi "isu publik" di Kelurahan Donggala ini. *Pertama*, pihak Syiah tampaknya cukup percaya diri dengan menampilkan diri secara terang-terangan di publik. AMJ, tokoh Syiah di wilayah itu pernah melakukan salat dengan gaya tangan tidak bersedekap, dan ketika AMJ meninggal dunia, pihak keluarga bersikukuh untuk meluruskan posisi tangan, tidak bersedekap sebagaimana publik Muslim pada umumnya. *Kedua*, kurangnya pengetahuan warga tentang Syiah menyebabkan stigma terhadap mereka berlangsung begitu cepat. Padahal, Syiah melalui ABI (Ahlulbait Indonesia) dan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia) adalah organisasi legal dan berbadan hukum di Indonesia (meski di Gorontalo masih dalam

proses). Para pelapor sangat meyakini kalau Syiah adalah gerombolan orang sesat yang keberadaannya patut diwaspadai (Sapriillah 2017, 36).

KESIMPULAN

Kehadiran NU di Gorontalo menjadi sangat penting karena watak keagamaan masyarakat Islam Gorontalo adalah masyarakat tradisional. Masyarakat Gorontalo terkenal sebagai masyarakat dengan adat yang sangat kental. Watak keberagaman seperti ini sangat rentan benturan dengan kelompok puritan. Kasus antara dai kelompok Salafi dengan warga setempat soal paradigma keberagaman adalah contoh yang baik. Eksistensi para tokoh NU diharapkan menjadi pilar penting untuk menjaga kedamaian. NU di Provinsi Gorontalo memegang peranan penting dalam merespon kehadiran kelompok-kelompok keagamaan yang berorientasi puritanis. NU menjadi perwakilan kultural bagi masyarakat Gorontalo yang memang bercorak tradisional.

Menghadapi kehadiran kelompok Salafi dan Syiah di Kota Gorontalo menjadi tugas NU karena dua hal; *Pertama*, kaum Salafi akan mengulangi perdebatan masa lalu tentang *khilafiyah*. *Kedua*, kehadiran Syiah

bisa memicu konflik internal antar umat beragama. Sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi damai, NU sudah dan akan terus berperan untuk menjadi juru damai yang baik.

Kekuatan NU di Gorontalo selama ini adalah gerakan kultural dan personalnya, bukan strukturalnya. Adanya tokoh agama seperti Kyai Rasyid Kamaru, Kyai Abd.Muin, Kyai Sarmada Inaku dan munculnya gerakan Gusdurian merupakan jangkar NU di Kota Gorontalo. Kehadiran mereka, tidak hanya untuk merepresentasikan eksistensi NU di Gorontalo, tetapi gerakan merekalah yang menjadi modal NU untuk menjaga tradisi keagamaan masyarakat Gorontalo secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian dan artikel ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Litbang Agama Makassar yang telah mempercayakan penulis untuk melakukan penelitian dan sepenuhnya membiayai penelitian ini hingga akhirnya dapat ditulis sebagai artikel ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshar, Ulil et. al. 2004. *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: Elsas.
- Al-Amri, Umar. 2006. *Sekelumit Al-Khairat Tilamuta dari Masa ke Masa, Sebuah Otobiografi*.
- Azis, Abdul et.al. 2004. *Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LP Ma'arif NU.
- Baso, Ahmad. 2011. *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*. Jakarta: Pustaka Afid.
- Baso, Ahmad. 2006. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo Liberal*. Jakarta: Erlangga.
- Ecip, S. Sinansari (Editor). 1994. *NU Khittah dan Godaan Politik*. Bandung: Mizan.

- Efendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Elyasa, KH. Dharwis. 1994. *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*. Jogjakarta: LKiS.
- Fealy, Greg dan Greg Barton (ed). 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Ida, La Ode. 2002. "Gerakan Sosial Kelompok Nahdlatul Ulama Progresif" Dalam, *Ringkasan Disertasi*. Tidak diterbitkan: Program Studi Sosiologi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
- Ismail, Arifuddin, dkk. 2006. *Varian Gerakan Keagamaan dan Lektur pada Masyarakat Islam*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Ismail, Faisal. 2004. *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Balitbang Diklat Keagamaan Depag RI.
- Jamhari & Jajang Jamhori. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Jamil, M. Mukhsin dkk. 2008. *Nalar Islam Nusantara, Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU*. Semarang: Fahmina Institute.
- Kawu, Shadiq. 2008. *Potensi Organisasi Keagamaan NU di Sulawesi Utara*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Kimura, Ehito. 2013. *Political Change and Territoriality in Indonesia*. London: Routledge.
- Maarif, Samsul. 2007. *Potret Gerakan Dakwah NU*. Jakarta: PP LDNU.
- Madjowa, Verrianto. 2005. *Pemilu Gorontalo 1955-2014*. Jakarta: Banana Perludem.
- Maskub, Masykur. 2004. *Forum Warga: Demokrasi Deliberatif Versus Demokrasi Representatif*. Jakarta: PP Lakpesdam NU.
- Nurrohmat, Binhad (ed). 2010. *Dari Kyai Kampung Ke NU Miring; Aneka Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru*. Jogjakarta: Arruz Media.
- Nuruddin, Sabara. 2017. *Pemetaan Aliran Keagamaan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Saprillah dkk. 2017. *Laporan Penelitian Pemetaan Kelompok Keagamaan di Provinsi Gorontalo*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
- Saprillah. 2008. *Potensi Organisasi Keagamaan NU di Sulawesi Tenggara*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Sunar, Subair. 2008. *Potensi Organisasi Keagamaan NU di Sulawesi Selatan*. Makassar: Balai Litbang Agama.
- Tim Peneliti Depdikbud. 1978. *Sejarah Nasional Kebangkitan Daerah Sulawesi Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tim Peneliti. 2010. *Peran Organisasi NU di Kawasan Timur Indonesia*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.

